

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tercatat pada tahun 2005, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 219 juta jiwa. Jumlah penduduk yang banyak pada satu sisi merupakan potensi bagi Indonesia dalam pembangunan, namun disisi lain jumlah penduduk yang banyak juga menimbulkan banyak kerugian, diantaranya semakin banyaknya kebutuhan akan lahan. Kenyataan yang ada saat ini juga ialah bahwa persebaran penduduk Indonesia sebagian besar berada di Pulau Jawa, pulau yang relative lebih kecil jika dibandingkan dengan Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Kondisi tersebut merupakan kondisi yang perlu diatasi bersama, termasuk yang terjadi di Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar.

Salah satu kawasan di Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk yang besar yaitu Kota Bandung. Bandung seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan pada berbagai kehidupan seperti jumlah penduduk, perkembangan teknologi, transportasi dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk yang meningkat dan arus urbanisasi yang setiap tahun bertambah menimbulkan berbagai permasalahan serius. Menurut data sensus tahun 2000, peningkatan jumlah penduduk akibat urbanisasi mencapai 2,3 % sedangkan pertumbuhan alami sebesar 1,08%. Data juga menunjukkan bahwa saat ini jumlah penduduk

Kota Bandung mencapai 3 juta jiwa pada siang hari dan 2,5 juta jiwa pada malam hari. Kabupaten Bandung berdekatan langsung dengan Kota Bandung yang dapat menunjang berkembangnya beberapa aktivitas kegiatan mulai dari perdagangan, industri, serta jasa lainnya dengan dukungan fasilitas transportasi, komunikasi, listrik yang memungkinkan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.

Pertambahan penduduk ini akan menyebabkan kebutuhan lahan untuk tempat bermukim maupun tempat untuk keperluan aktivitas meningkat. Akhirnya Bandung sampai pada kondisi yang melampaui batas yaitu dari segi jumlah penduduk yang terlalu banyak. Peningkatan jumlah penduduk membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana social. Karena keterbatasan luas lahan yang tersedia, tidak menutup kemungkinan adanya areal permukiman yang berdiri di atas lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Salah satu kasus nyata yang tengah berkembang belakangan ini yaitu penguasaan tanah PT. Kereta Api (Persero) oleh penduduk di Kabupaten Bandung yang dijadikan lahan permukiman. Jalur kereta api Bandung-Ciwidey sudah tidak dioperasikan sejak tahun 1979an, sebagai akibatnya maka rel kereta yang ada sudah tidak berfungsi lagi untuk prasarana perkeretaapian. Tanah bekas rel kereta api tersebut yang berada di Kabupaten Bandung pada waktu sekarang telah dikuasai masyarakat dan telah berubah menjadi pemukiman. Kemudian adanya rencana untuk mengaktifkan kembali pengoperasian kereta api Bandung Ciwidey. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, sebagai berikut:

Sebaiknya PT Kereta Api (PT KA) segera merevitalisasi lintasan kereta api yang ada di Jabar. Saat ini banyak rel lintasan kereta api dalam kondisi

cukup memprihatinkan dan terbengkalai, serta banyak berdiri bangunan liar disekitar lintasan. Kondisi itu sangat kita sesalkan. Padahal, bila lintasan itu dapat dioptimalkan, selain dapat melayani masyarakat untuk memperoleh alat transportasi, juga dapat menguntungkan PT KA. (Pikiran Rakyat, 14 Desember 2008).

Diaktifkannya kembali rel kereta api yang sudah lama tidak dioperasikan dilakukan dalam rangka mengurangi kepadatan lalu lintas adalah berupa langkah manajemen pengendalian lalu lintas. Prioritas pertama yang akan dibuka adalah jalur Bandung-Rancaekek-Tanjungsari dan Bandung-Ciwidey, yang ditargetkan pada awal 2010 sudah kosong dan siap dikerjakan (tempo:Agustus 2009). Rencana ini sulit direalisasikan. Keadaan tersebut menunjukkan adanya suatu permasalahan dimana PT.Kereta Api (Persero) secara yuridis sebagai pemilik tanah bekas rel kereta api tetapi secara fisik telah dikuasai masyarakat. Tanah-tanah yang merupakan asset dari PT. Kereta Api (Persero) dikuasai oleh masyarakat yang dipergunakan untuk berbagai keperluan, ada yang seizin dari PT. Kereta Api (Persero) tapi tidak sedikit pula masyarakat yang melakukan penghunian secara liar.

Selain dari kasus di atas, hal yang hampir sama juga terjadi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bandung yang dilalui oleh jalur rel Bandung-Ciwidey. Selanjutnya bila ada rencana pengaktifan kembali jalur dimaksud, maka akan mengakibatkan benturan kepentingan dengan masyarakat yang menguasainya. Hal ini bisa dilihat bahwa sepanjang jalur tersebut telah menjadi perkampungan dan banyak berdiri bangunan rumah baik yang permanen maupun semi permanen serta terhadap sarana jalur rel yaitu besi rel sudah banyak yang tidak kelihatan karena tertutup bangunan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk menganalisis bagaimana respon penduduk di sepanjang jalur kereta Bandung-Ciwidey dalam menghadapi rencana tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka masalah yang diajukan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik penduduk yang membangun permukiman di sepanjang jalur kereta api Bandung-Ciwidey?
2. Bagaimana respon penduduk di Kabupaten Bandung terhadap rencana pengaktifan kembali jalur kereta Bandung- Ciwidey?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui karakteristik penduduk yang membangun permukiman di sepanjang jalur kereta api Bandung-Ciwidey.
2. Mengetahui dan mengidentifikasi respon penduduk di Kabupaten Bandung terhadap rencana pengaktifan kembali jalur kereta Bandung- Ciwidey.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam penerapan konsep dan teori geografi dengan kenyataan di lapangan.
2. Memberikan masukan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Geografi, secara teoritis maupun terapan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan khususnya mengenai masalah permukiman di Kabupaten Bandung.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam menginterpretasikan penelitian ini maka akan dijabarkan definisi operasionalnya sebagai berikut :

1. Respon

Dalam istilah psikologi, respon dikenal dengan proses memunculkan dan membayangkan kembali gambaran hasil pengamatan. Menurut Kartono (1996:58) “respon bisa diidentifikasi sebagai gambaran ingatan dari pengamatan”. Sedangkan Ahmadi (1992:64) menyatakan respon adalah “gambaran ingatan dan pengamatan yang mana objek yang telah diamati tidak lagi berada dalam ruang dan waktu pengamatan”. Berdasarkan pendapat tersebut jelaslah bahwa terjadinya respon itu harus melalui pengamatan terlebih dahulu.

Berbicara mengenai respon, Syah (1995:118) mengemukakan bahwa “pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera, seperti mata dan telinga”. Jadi respon adalah bayangan yang tinggal dalam ingatan kita setelah melalui proses pengamatan terlebih dahulu. Dalam proses pengamatan, respon tidak terikat oleh tempat dan waktu. Selain itu, yang menjadi objek dari respon itu masih kabur dan tidak mendetail dan juga tidak memerlukan adanya perangsang dan bersifat imajiner.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa respon itu bermula dari adanya suatu tindakan pengamatan yang menghasilkan

suatu kesan sehingga menjadi kesadaran yang dapat dikembangkan pada masa sekarang atau pun menjadi antisipasi pada masa yang akan datang. Jadi jelaslah bahwa pengamatan merupakan modal dasar dari respon, sedangkan modal dari pengamatan adalah alat indera yang meliputi penglihatan dan penginderaan.

Maka dalam penelitian ini dari semua hal yang terjadi di lapangan akan menimbulkan tindakan yang melalui pengamatan akan menghasilkan respon dari penduduk yaitu respon penduduk terhadap adanya rencana pengaktifan kembali rel kereta Bandung-Ciwidey.

2. Penduduk

Penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokkan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama. Beragam pengelompokkan dapat dibuat seperti atas dasar etnis, agama, kewarganegaraan, bahasa, pendidikan yang diselesaikan, umur, jenis kelamin, dan golongan pendapatan.

3. Rencana pengaktifan kembali jalur kereta

Pengaktifan kembali jalur kereta api yang sudah lama tidak dioperasikan. Jalur kereta api Bandung-Ciwidey sudah tidak dioperasikan sejak tahun 1979an. Pengaktifan rel kereta api yang sudah lama tidak dioperasikan dilakukan dalam rangka mengurangi kepadatan lalu lintas adalah berupa langkah manajemen pengendalian lalu lintas.